



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Kelompok Tani Hutan: Studi Kasus di KPH Way Terusan

(Factors Influencing Farmers' Participation in Forest Farmer Groups: A Case Study in the Way Terusan Forest Management Unit (KPH Way Terusan))

I Nyoman Riyawan^{1*}, Christine Wulandari¹

¹ Magister Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Kedaton Bandar Lampung 35144, Indonesia

Informasi Artikel:

Submission : 09 Desember 2024
Revised : 15 Mei 2025
Accepted : 18 Mei 2025
Published : 20 Mei 2025

*Penulis Korespondensi:

I Nyoman Riyawan
Magister Kehutanan, Fakultas Pertanian,
Universitas Lampung, Jl. Prof Soemantri
Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Kedaton
Bandar Lampung 35144, Indonesia
e-mail: nyoman.riyawan@gmail.com
Telp: +62 852-6945-8445

Makila 19 (1) 2025: 172-187

DOI:
<https://doi.org/10.30598/makila.v19i1.16594>



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Copyright © 2025 Author(s): I Nyoman Riyawan, Christine Wulandari
Journal homepage:
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/makila>
Journal e-mail: makilajournal@gmail.com

Research Article · Open Access

ABSTRACT

This study examines the determinants influencing farmer participation in forest farmer groups (Kelompok Tani Hutan – KTH) within the jurisdiction of the Forest Management Unit (KPH) Way Terusan. Primary data were collected through structured surveys and in-depth interviews with 50 respondents, comprising both KTH members and non-members, during the period from August to September 2024. The study employs descriptive statistical analysis and Likert scale assessments to evaluate the socio-economic characteristics, institutional dynamics, and social factors that shape participation behavior. The findings reveal that the principal motivation for farmers to engage with KTH lies in securing legal access to forest resources through the Social Forestry Program, which fosters sustainable forest management practices and aims to enhance community livelihoods. Key factors affecting participation include perceived economic benefits, the effectiveness of institutional support provided by KPH Way Terusan, and the strength of social capital within local communities. However, despite these incentives, several critical barriers to effective participation remain, including limited market access for forest products, varying degrees of trust in KTH governance structures, and insufficient extension and capacity-building services. These results highlight the imperative to strengthen institutional frameworks and develop market-oriented support mechanisms to enhance the effectiveness of KTH in promoting sustainable forest management and improving socio-economic resilience among forest-dependent communities.

KEYWORDS: Farmer Participation, Forest Management Unit (KPH) Way Terusan, Social Forestry, Community-Based Forest Management, Institutional Support.

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan yang memengaruhi partisipasi petani dalam Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei terstruktur dan wawancara mendalam terhadap 50 responden, yang mencakup anggota dan non-anggota KTH, pada periode Agustus hingga September 2024. Metode analisis yang digunakan meliputi statistik deskriptif dan skala Likert untuk mengevaluasi faktor-faktor sosio-ekonomi, kelembagaan, dan sosial yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi utama petani untuk bergabung dalam KTH adalah untuk memperoleh akses legal terhadap sumber daya hutan melalui Program Perhutanan Sosial, yang bertujuan mendorong pengelolaan hutan lestari serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor kunci yang berpengaruh terhadap partisipasi meliputi persepsi terhadap manfaat ekonomi, efektivitas dukungan kelembagaan dari KPH Way Terusan, dan kekuatan modal sosial dalam komunitas lokal. Namun, partisipasi optimal masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya akses pasar bagi hasil hutan, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap tata kelola KTH, serta kurang memadainya layanan penyuluhan dan pendampingan teknis. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan peran kelembagaan KPH, peningkatan kapasitas kelembagaan KTH, dan pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis akses pasar untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

KATA KUNCI: KPH Way Terusan, Partisipasi Petani, Perhutanan Sosial, Modal Sosial, Penguatan Kelembagaan.

PENDAHULUAN

Program Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam memberikan akses legal kepada masyarakat, termasuk petani, untuk mengelola kawasan hutan negara secara berkelanjutan. Program ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, tetapi juga untuk mendukung upaya konservasi lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, skema ini dirancang untuk memperkuat hak-hak masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara sah melalui berbagai pola pengelolaan, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Agusti et al. (2019) menyatakan bahwa tujuan jangka panjang dari Perhutanan Sosial meliputi pemulihan kondisi hutan yang kritis, peningkatan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan, perbaikan

kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan hidup berbasis potensi sumber daya hutan yang lestari. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan diyakini akan mendorong terciptanya tatanan kehidupan yang produktif, harmonis, dan selaras dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan (Armiwal dan Suhaibah, 2019).

Dalam konteks implementasi di lapangan, pengelolaan Perhutanan Sosial dilaksanakan melalui pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH), yang berperan dalam penguatan kelembagaan, pengelolaan kawasan hutan, dan pengembangan usaha berbasis hasil hutan. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif anggota KTH serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar hutan, pemerintah (KLHK, Dinas Kehutanan, KPH, pemerintah daerah), lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan akses terhadap pasar yang memadai. Di Indonesia, kelompok tani telah lama berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui kolaborasi, pelatihan, dan peningkatan akses terhadap sumber daya produksi. Namun, keberhasilan kelompok tani, termasuk KTH, sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi anggotanya. Berdasarkan laporan UPTD KPH Way Terusan, sebagian besar petani di Kawasan Register 47 Way Terusan telah tergabung dalam KTH, sementara sebagian kecil lainnya belum membentuk kelompok formal. Kelompok tani hutan ini berfungsi sebagai organisasi sosial yang bertujuan untuk memperkuat aksi kolektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi program Perhutanan Sosial di Indonesia. Misalnya, studi oleh Rahayu et al. (2020) menegaskan bahwa penguatan kelembagaan kelompok tani hutan menjadi faktor kunci dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Nugroho et al. (2021) menekankan bahwa partisipasi petani dalam KTH dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi ekonomi, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah dan akses terhadap pasar hasil hutan. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut masih bersifat umum dan kurang menyoroti dinamika partisipasi petani dalam konteks spesifik wilayah kerja KPH, termasuk di KPH Way Terusan yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan ekologi yang unik. Selain itu, kajian empiris yang secara komprehensif menganalisis pengaruh faktor kelembagaan, persepsi manfaat ekonomi, kekuatan modal sosial, dan keterbatasan akses pasar terhadap partisipasi petani dalam KTH masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung lebih menitikberatkan pada aspek formal kelembagaan tanpa mengeksplorasi secara mendalam interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan persepsi petani terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan (Susanto et al., 2022). Padahal, menurut Chambers (2017), keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sangat dipengaruhi oleh integrasi antara aspek kelembagaan yang adaptif dan modal sosial yang kuat di tingkat komunitas.

Sebagai unit pengelola kehutanan di wilayah tersebut, KPH Way Terusan menjadi studi kasus yang relevan dalam menelaah implementasi Perhutanan Sosial. Petani yang tergabung dalam KTH memperoleh berbagai manfaat, seperti hak akses legal terhadap kawasan hutan dan kesempatan mengikuti pelatihan teknis. Namun demikian, tantangan struktural masih dihadapi, terutama terkait dengan kelembagaan KTH yang belum optimal serta keterbatasan akses pasar bagi produk hasil hutan. Widodo et al. (2020) menegaskan bahwa meskipun petani telah memperoleh hak kelola hutan, tanpa penguatan kelembagaan yang efektif dan dukungan akses pasar yang memadai, manfaat ekonomi dan sosial dari partisipasi dalam KTH tidak dapat sepenuhnya direalisasikan. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang signifikan dalam memahami secara lebih rinci faktor-faktor determinan partisipasi petani dalam KTH di wilayah KPH Way Terusan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih kontekstual dan mendalam mengenai pengaruh faktor sosio-ekonomi, kelembagaan, dan sosial terhadap partisipasi petani, serta implikasinya bagi efektivitas implementasi skema Perhutanan Sosial. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi petani dalam Kelompok Tani Hutan di wilayah KPH Way Terusan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peran skema Perhutanan Sosial dalam mendorong peningkatan partisipasi petani serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar hutan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan, tepatnya di Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, pada bulan Agustus hingga September 2024. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena merupakan area implementasi aktif Program Perhutanan Sosial, khususnya di Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di sekitar Kawasan Hutan Register 47 Way Terusan, baik yang telah tergabung dalam *Kelompok Tani Hutan* (KTH) maupun yang belum bergabung. Jumlah responden yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan keterwakilan kedua kelompok tersebut.

Instrumen dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kombinasi metode observasi, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner terstruktur. Instrumen penelitian meliputi kuesioner, alat tulis, kamera, perekam suara, dan buku catatan lapangan. Data yang dikumpulkan terdiri dari: **Data**

Primer, diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan dan wawancara dengan responden menggunakan kuesioner yang telah disusun sebelumnya. Data ini meliputi karakteristik sosial-ekonomi, pengalaman dalam pengelolaan hutan, persepsi terhadap manfaat program Perhutanan Sosial, serta tingkat kepercayaan terhadap kelembagaan KTH. **Data Sekunder**, diperoleh dari dokumentasi resmi dan laporan instansi terkait, seperti UPTD KPH Way Terusan, Dinas Kehutanan, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Data sekunder mencakup informasi mengenai kondisi umum wilayah penelitian, profil kelembagaan KTH, serta data pendukung lainnya yang berkaitan dengan program Perhutanan Sosial.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Data Kuantitatif seperti usia, tingkat pendidikan, pengalaman usaha tani, dan luas lahan garapan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, meliputi perhitungan rata-rata, distribusi frekuensi, dan persentase untuk menggambarkan karakteristik responden.

Data Kualitatif yang bersifat ordinal, seperti persepsi petani terhadap manfaat akses legal atas hutan dan tingkat kepercayaan terhadap pengurus KTH, dianalisis menggunakan Skala Likert. Skala ini digunakan untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan, dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, dan 5 = Sangat Setuju. Analisis Skala Likert ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan persepsi dan sikap responden terkait faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi dalam KTH. Data Nominal seperti status keanggotaan dalam KTH dianalisis secara deskriptif melalui tabulasi frekuensi dan presentase untuk menggambarkan distribusi partisipasi petani. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi deskriptif guna mendukung interpretasi yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi petani dalam *Kelompok Tani Hutan* di wilayah KPH Way Terusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden adalah gambaran keadaan responden yang terdiri atas umur, pendidikan, tanggungan keluarga, pengalaman dalam usaha tani dan luas areal garapan yang dimiliki (Wardhany 2009). Karakteristik responden merupakan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat (petani) dalam pengelolaan hutan. Karakteristik responden digambarkan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Karakteristik petani di KPH Way Terusan

| Karakteristik | Kategori | Frekuensi (n=50) | Persentase (%) |
|---------------|-------------|------------------|----------------|
| Umur | 20-30 tahun | 5 | 10 |
| | 31-40 tahun | 15 | 30 |
| | 41-50 tahun | 20 | 40 |
| | 51-60 tahun | 10 | 20 |

| Karakteristik | Kategori | Frekuensi (n=50) | Persentase (%) |
|----------------------|-------------|------------------|----------------|
| Pendidikan | SD | 25 | 50 |
| | SMP | 15 | 30 |
| | SMA | 10 | 20 |
| Tanggungan Keluarga | 1-2 orang | 15 | 30 |
| | 3-4 orang | 25 | 50 |
| | 5-6 orang | 10 | 20 |
| Pengalaman Usahatani | 1-5 tahun | 5 | 10 |
| | 6-10 tahun | 10 | 20 |
| | 11-15 tahun | 15 | 30 |
| | >15 tahun | 20 | 40 |
| Luas Lahan Garapan | <1 Ha | 10 | 20 |
| | 1-2 Ha | 20 | 40 |
| | 2.1-3 Ha | 10 | 20 |
| | >3 Ha | 10 | 20 |

Sumber: analisis data primer, 2025

Hasil analisis karakteristik responden yang disajikan pada **Tabel 1** menunjukkan bahwa sebagian besar petani yang terlibat dalam penelitian ini berada pada kelompok usia produktif. Responden dengan rentang usia 41–50 tahun mendominasi sebanyak 40%, diikuti oleh kelompok usia 31–40 tahun sebesar 30%. Sementara itu, responden berusia 51–60 tahun tercatat sebanyak 20%, dan usia 20–30 tahun merupakan kelompok terkecil sebesar 10%. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas petani yang berpartisipasi dalam *Kelompok Tani Hutan* (KTH) berada pada fase usia yang secara fisik masih produktif dan potensial untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan. Dominasi kelompok usia menengah ini juga mencerminkan adanya potensi keberlanjutan partisipasi jika didukung oleh penguatan kapasitas dan pemberdayaan yang tepat sasaran.

Dari segi tingkat pendidikan, mayoritas responden berpendidikan rendah, yaitu hanya mencapai jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 50%, diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 30%, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 20%. Rendahnya tingkat pendidikan ini menjadi tantangan tersendiri dalam penguatan kapasitas kelembagaan KTH, terutama dalam hal kemampuan pengelolaan administratif, akses informasi pasar, serta adopsi teknologi pengolahan hasil hutan. Hal ini sejalan dengan temuan Widodo et al. (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemampuan petani dalam memahami manfaat program Perhutanan Sosial dan memaksimalkan peluang ekonomi yang tersedia.

Dari aspek tanggungan keluarga, sebagian besar responden (50%) memiliki tanggungan antara 3–4 orang, diikuti oleh tanggungan 1–2 orang (30%) dan 5–6 orang (20%). Besarnya tanggungan keluarga ini menjadi faktor pendorong bagi petani untuk meningkatkan pendapatan melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan KTH. Namun, kondisi ini juga dapat menimbulkan tekanan ekonomi yang tinggi, yang pada gilirannya mendorong preferensi terhadap aktivitas ekonomi jangka pendek daripada kegiatan konservasi jangka panjang, kecuali jika manfaat ekonomi dari program Perhutanan Sosial dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengalaman usaha tani, mayoritas responden telah memiliki pengalaman yang cukup panjang, dengan 40% responden memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun, diikuti oleh 30%

dengan pengalaman 11–15 tahun. Responden dengan pengalaman 6–10 tahun tercatat sebanyak 20%, sedangkan yang memiliki pengalaman di bawah 5 tahun hanya 10%. Pengalaman usaha tani yang relatif panjang menunjukkan bahwa responden telah cukup memahami dinamika pengelolaan sumber daya lahan dan hutan, yang dapat menjadi modal sosial penting dalam pengembangan KTH. Akan tetapi, tanpa adanya inovasi dalam pola usaha tani dan diversifikasi produk hasil hutan, pengalaman ini belum tentu berkontribusi optimal terhadap peningkatan kesejahteraan. Dari segi luas lahan garapan, mayoritas responden (40%) memiliki lahan dengan luas 1–2 hektare, sedangkan responden dengan lahan kurang dari 1 hektare, 2.1–3 hektare, dan lebih dari 3 hektare masing-masing tercatat sebesar 20%. Keterbatasan luas lahan garapan menjadi tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Kepemilikan lahan yang sempit mendorong pentingnya optimalisasi pemanfaatan lahan melalui penerapan agroforestri dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi tinggi.

Karakteristik demografis dan sosial-ekonomi responden secara keseluruhan menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi partisipasi yang tinggi dalam KTH, masih dibutuhkan strategi pemberdayaan yang komprehensif untuk mengatasi keterbatasan pendidikan, akses lahan, dan beban ekonomi rumah tangga. Penguatan kapasitas kelembagaan KTH, peningkatan keterampilan teknis, serta perluasan akses pasar menjadi kunci dalam mendorong partisipasi yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam implementasi Program Perhutanan Sosial di wilayah KPH Way Terusan.

Akses Legal dan Partisipasi

Akses legal terhadap kawasan hutan merupakan salah satu faktor determinan yang mendorong partisipasi petani dalam *Kelompok Tani Hutan* (KTH). Ketersediaan hak kelola yang sah atas sumber daya hutan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang bagi petani untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan usaha tani hutan yang berkelanjutan. Partisipasi petani dalam KTH juga dipengaruhi oleh interaksi kompleks berbagai faktor, termasuk aspek ekonomi, sosial, pengetahuan, dan peran kelembagaan yang saling berkaitan, disajikan dalam **Tabel 2**.

Tabel 2. Akses legal dan partisipasi petani di KPH Way Terusan

| Akses Legal dan Partisipasi | Kategori | Jumlah Responden (n=50) | Persentase (%) |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| Status Keanggotaan KTH | Sudah Bergabung | 30 | 60 |
| | Belum Bergabung | 20 | 40 |
| Pengetahuan Perhutanan Sosial | Tahu | 43 | 86 |
| | Tidak Tahu | 7 | 14 |
| Manfaat Akses Legal | Tinggi (4-5) | 35 | 70 |
| | Sedang (3) | 10 | 20 |
| | Rendah (1-2) | 5 | 10 |
| Dampak Akses Legal ke Partisipasi | Tinggi (4-5) | 32 | 64 |
| | Sedang (3) | 13 | 26 |
| | Rendah (1-2) | 5 | 10 |

Sumber: analisis data primer, 2025

Hasil penelitian pada **Tabel 2** menunjukkan bahwa sebanyak 60% responden telah tergabung dalam KTH, sementara 40% lainnya belum menjadi anggota. Di sisi lain, mayoritas petani

(86%) telah mengetahui keberadaan dan substansi Program Perhutanan Sosial, sedangkan 14% masih belum memiliki pengetahuan terkait program tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pengetahuan petani tentang Program Perhutanan Sosial dengan keputusan mereka untuk berpartisipasi dalam KTH. Temuan ini sejalan dengan pendapat Hombokau et al. (2023), yang menyatakan bahwa motivasi utama petani untuk bergabung dalam KTH adalah guna memperoleh kepastian hak pengelolaan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti agroforestri, budidaya tanaman pangan, serta pengelolaan hasil hutan kayu dan non-kayu. Namun demikian, masih tingginya proporsi petani yang belum tergabung dalam KTH (40%) dan yang tidak memahami sepenuhnya konsep Perhutanan Sosial (14%) mengindikasikan adanya hambatan informasi yang perlu segera diatasi. Kurangnya penyebaran informasi secara efektif menjadi kendala dalam memperluas jangkauan program ini. Hal ini menegaskan pentingnya peran KPH Way Terusan dalam meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan, serta memastikan bahwa manfaat program Perhutanan Sosial dapat dipahami secara komprehensif oleh seluruh lapisan masyarakat. Horota et al. (2018) juga menekankan bahwa penguatan kelembagaan masyarakat dan dukungan intensif dari pemerintah merupakan kunci dalam meningkatkan partisipasi petani dalam program ini.

Persepsi petani terhadap manfaat akses legal sangat berkaitan erat dengan tingkat partisipasi mereka. Sebagian besar responden (70%) menilai manfaat akses legal sebagai tinggi, khususnya dalam aspek kepastian pengelolaan lahan dan peluang peningkatan kesejahteraan. Selain itu, 64% responden menyatakan bahwa akses legal memberikan dampak positif yang besar terhadap partisipasi mereka dalam KTH. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Absori et al. (2017), yang menyatakan bahwa legalitas Perhutanan Sosial mampu memberikan harapan kemakmuran bagi masyarakat sekitar hutan, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan. Lebih lanjut, Alimuna dan Srifitriani (2022) mengemukakan bahwa petani yang telah tergabung dalam KTH memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh akses legal pengelolaan kawasan hutan. Di KPH Way Terusan, anggota KTH telah mendapatkan izin pengelolaan hutan jangka panjang hingga 35 tahun, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan (SK) perizinan masing-masing KTH. Jaminan hukum ini memberikan kepastian bagi petani untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara produktif tanpa khawatir terhadap risiko sanksi hukum. Akses legal yang diberikan diharapkan tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga menjadi wujud kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat, khususnya di kawasan hutan negara yang merupakan daerah terdepan dan terluar Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan akses legal bagi petani merupakan strategi fundamental dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam KTH. Upaya ini harus diimbangi dengan peningkatan penyebaran informasi, penguatan kelembagaan KTH, serta penyediaan fasilitas pendukung yang dapat mempercepat realisasi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar hutan. Dengan demikian, Program Perhutanan Sosial diharapkan dapat

berkontribusi secara nyata dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah KPH Way Terusan.

Faktor Ekonomi dan Partisipasi Petani dalam KTH

Program Perhutanan Sosial juga menjadi penggerak signifikan dalam hal ekonomi karena program ini memberikan hak kelola kepada petani, yang dalam jangka panjang dapat memberikan manfaat finansial melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara legal sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan (Martapani et al. 2021). Ekonomi merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan apakah seorang petani memilih untuk bergabung dalam kelompok tani hutan. Keuntungan finansial yang diharapkan dari partisipasi menjadi alasan utama petani untuk terlibat (Faizal & Sunan 2023). Faktor ekonomi petani di KPH Way Terusan disajikan dalam **Tabel 3**.

Tabel 3. Faktor Ekonomi dan Partisipasi Petani dalam KTH

| Faktor Ekonomi | Kategori | Jumlah Responden (n=50) | Persentase (%) |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Pendapatan per Bulan (Rp) | <1.000.000 | 5 | 10 |
| | 1.000.000 - 2.000.000 | 20 | 40 |
| | 2.000.001 - 3.000.000 | 15 | 30 |
| | >3.000.000 | 10 | 20 |
| Kontribusi KTH ke Pendapatan | Tinggi (4-5) | 25 | 50 |
| | Sedang (3) | 15 | 30 |
| | Rendah (1-2) | 10 | 20 |
| Akses ke Pasar | Baik (4-5) | 20 | 40 |
| | Cukup (3) | 20 | 40 |
| | Kurang (1-2) | 10 | 20 |

Sumber: analisis data primer, 2025

Hasil analisis faktor ekonomi yang memengaruhi partisipasi petani dalam *Kelompok Tani Hutan* (KTH) sebagaimana disajikan pada **Tabel 3** menunjukkan bahwa aspek pendapatan, kontribusi KTH terhadap pendapatan, dan akses pasar merupakan determinan penting dalam mendorong keterlibatan petani. Dari segi pendapatan bulanan, mayoritas responden (40%) berada pada kisaran Rp1.000.000–Rp2.000.000, diikuti oleh 30% responden dengan pendapatan antara Rp2.000.001–Rp3.000.000. Sementara itu, 20% responden memiliki pendapatan di atas Rp3.000.000, dan hanya 10% yang berpendapatan di bawah Rp1.000.000 per bulan. Distribusi pendapatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani berada pada kategori pendapatan menengah ke bawah, yang mendorong mereka untuk mencari alternatif peningkatan pendapatan melalui keikutsertaan dalam KTH. Kondisi ini sejalan dengan teori kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Maslow (1943), di mana pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi pendorong utama dalam pengambilan keputusan partisipasi pada kegiatan sosial-ekonomi, termasuk dalam skema Perhutanan Sosial.

Kontribusi KTH terhadap pendapatan petani juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi. Sebanyak 50% responden menilai kontribusi KTH terhadap pendapatan mereka berada pada kategori tinggi (skor 4–5), sementara 30% menilai pada kategori sedang (skor 3), dan 20% menilai rendah (skor 1–2). Tingginya kontribusi KTH terhadap pendapatan menunjukkan bahwa program Perhutanan Sosial yang diimplementasikan melalui KTH telah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi sebagian besar petani. Hal ini menjadi bukti bahwa

KTH memiliki potensi besar sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, terutama apabila didukung dengan penguatan kelembagaan dan akses terhadap sumber daya yang memadai. Namun demikian, aspek akses pasar masih menjadi tantangan yang cukup signifikan. Sebanyak 40% responden menilai akses pasar dalam kategori baik (skor 4-5), 40% menilai cukup (skor 3), dan 20% menilai kurang (skor 1-2). Keterbatasan akses pasar menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil pengelolaan hutan. Hal ini sejalan dengan temuan Widodo et al. (2020), yang menyatakan bahwa meskipun petani memperoleh hak legal atas pengelolaan hutan, tanpa dukungan akses pasar yang memadai, potensi peningkatan pendapatan tidak dapat direalisasikan secara optimal.

Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan rantai nilai (*value chain*) produk hasil hutan, baik produk kayu maupun non-kayu, serta perluasan jaringan kemitraan dengan pelaku pasar. Peningkatan kapasitas petani dalam aspek manajemen usaha dan pemasaran juga menjadi faktor kunci yang perlu mendapat perhatian, agar kontribusi KTH terhadap pendapatan petani semakin meningkat dan berkelanjutan. Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor ekonomi, terutama pendapatan dan kontribusi ekonomi KTH, merupakan pendorong utama partisipasi petani dalam kelompok tani hutan. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi petani, peningkatan akses pasar, serta pengembangan produk berbasis hasil hutan yang memiliki nilai tambah tinggi menjadi strategi yang sangat relevan untuk meningkatkan efektivitas program Perhutanan Sosial di wilayah KPH Way Terusan.

Faktor Sosial dan Jaringan Komunitas

Aspek sosial merupakan aspek yang mempertimbangkan tingkat partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam melaksanakan program perhutanan sosial sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan (Toha et al. 2023). Faktor sosial, terutama modal sosial dan keterikatan komunitas, berperan penting dalam partisipasi petani dalam kelompok tani hutan. Herdiyanti dan Saputra (2022) mengungkapkan bahwa keberhasilan kelompok tani hutan sangat ditentukan oleh kuatnya jaringan sosial yang ada di antara anggota. Adapun faktor sosial dan jaringan komunitas petani di KPH Way Terusan disajikan pada **Tabel 4**.

Tabel 4. Faktor Sosial dan Jaringan Komunitas

| Faktor Sosial dan Jaringan Komunitas | Kategori | Jumlah Responden (n=50) | Persentase (%) |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| Keberadaan Jaringan Sosial | Kuat (4-5) | 30 | 60 |
| | Sedang (3) | 15 | 30 |
| | Lemah (1-2) | 5 | 10 |
| Pengaruh Teman/Keluarga | Ya | 35 | 70 |
| | Tidak | 15 | 30 |
| Partisipasi Kegiatan Sosial | Tinggi (4-5) | 25 | 50 |
| | Sedang (3) | 20 | 40 |
| | Rendah (1-2) | 5 | 10 |

Sumber: analisis data primer, 2025

Analisis terhadap faktor sosial dan jaringan komunitas sebagaimana disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dimensi sosial memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi petani

dalam *Kelompok Tani Hutan* (KTH). Keberadaan jaringan sosial yang kuat, pengaruh lingkungan terdekat, serta tingkat keterlibatan dalam aktivitas sosial komunitas menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam meningkatkan partisipasi petani pada program Perhutanan Sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden (60%) menilai keberadaan jaringan sosial dalam komunitas mereka berada pada kategori kuat (skor 4-5), sementara 30% menilai sedang (skor 3), dan hanya 10% yang menilai lemah (skor 1-2). Kondisi ini mencerminkan tingginya kohesi sosial di lingkungan masyarakat sekitar kawasan hutan, yang berpotensi memperkuat solidaritas dan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya hutan. Menurut Putnam (2000), jaringan sosial yang kuat berperan penting dalam membangun kepercayaan kolektif dan memperkuat modal sosial yang esensial bagi keberhasilan program berbasis masyarakat, seperti Perhutanan Sosial. Selain itu, pengaruh teman dan keluarga terhadap keputusan bergabung dalam KTH juga teridentifikasi sangat dominan, di mana 70% responden menyatakan bahwa keputusan mereka dipengaruhi oleh dorongan atau rekomendasi dari lingkungan sosial terdekat. Fenomena ini menunjukkan bahwa proses difusi inovasi dan adopsi program Perhutanan Sosial dalam komunitas setempat berlangsung secara efektif melalui mekanisme *peer influence* dan komunikasi interpersonal. Hal ini sejalan dengan teori *Diffusion of Innovations* yang dikemukakan oleh Rogers (2003), yang menegaskan bahwa keputusan adopsi inovasi cenderung dipengaruhi oleh figur-figur yang dipercaya dalam lingkungan sosial.

Dari aspek partisipasi dalam kegiatan sosial, sebanyak 50% responden menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi (skor 4-5), 40% pada kategori sedang (skor 3), dan hanya 10% pada kategori rendah (skor 1-2). Tingginya keterlibatan responden dalam berbagai aktivitas sosial masyarakat, seperti kegiatan gotong royong, pertemuan komunitas, dan kelompok keagamaan, menunjukkan adanya ketersediaan ruang interaksi sosial yang positif. Hal ini tidak hanya memperkuat solidaritas sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertukaran informasi dan peningkatan kesadaran kolektif terkait manfaat dan pentingnya partisipasi dalam KTH.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Perhutanan Sosial tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi dan kelembagaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial dan intensitas partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Oleh karena itu, strategi penguatan program sebaiknya diarahkan pada pemberdayaan komunitas melalui penguatan modal sosial, pengembangan jaringan kerja sama antar kelompok tani hutan, serta fasilitasi forum-forum diskusi yang mendorong pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarpetani. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat komitmen partisipasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

Kepercayaan terhadap Manajemen Kelompok

Kepercayaan terhadap kepemimpinan dan struktur manajemen *Kelompok Tani Hutan* (KTH) merupakan faktor fundamental yang memengaruhi keputusan petani untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok. Tingkat kepercayaan ini tercermin melalui kualitas

komunikasi antara pengurus dan anggota, serta sejauh mana transparansi informasi terkait kebijakan, pengelolaan sumber daya, dan distribusi manfaat disampaikan secara terbuka kepada anggota. Toha et al. (2023) menegaskan bahwa manajemen kelompok yang dijalankan secara transparan dan akuntabel berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan dan partisipasi anggota, yang pada akhirnya memperkuat kinerja kelembagaan kelompok, disajikan dalam **Tabel 5**.

Tabel 5. Tingkat kepercayaan petani terhadap manajemen kelompok

| Kepercayaan terhadap Manajemen Kelompok | Kategori | Jumlah Responden (n=50) | Persentase (%) |
|---|--------------|-------------------------|----------------|
| Kepercayaan terhadap Pengurus | Tinggi (4-5) | 28 | 56 |
| | Sedang (3) | 15 | 30 |
| | Rendah (1-2) | 7 | 14 |
| Transparansi Manajemen | Tinggi (4-5) | 25 | 50 |
| | Sedang (3) | 18 | 36 |
| | Rendah (1-2) | 7 | 14 |
| Keterlibatan dalam Keputusan | Tinggi (4-5) | 22 | 44 |
| | Sedang (3) | 20 | 40 |
| | Rendah (1-2) | 8 | 16 |

Sumber: analisis data primer, 2025

Hasil analisis yang ditampilkan dalam Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar petani di wilayah KPH Way Terusan (56%) memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pengurus KTH. Meskipun demikian, masih terdapat 30% responden yang menunjukkan tingkat kepercayaan sedang, dan 14% responden yang mengindikasikan tingkat kepercayaan rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas petani memandang kepengurusan KTH secara positif, masih terdapat kelompok yang meragukan kredibilitas dan integritas manajemen kelompok. Hal ini menjadi indikasi perlunya perbaikan dalam aspek komunikasi, transparansi, dan penguatan peran pengurus sebagai fasilitator yang responsif terhadap kepentingan anggota. Dari aspek transparansi manajemen, hanya 50% responden yang menilai pengurus KTH telah bersikap transparan dalam pengelolaan kelompok, sementara 36% menilai pada tingkat sedang, dan 14% menilai rendah. Rendahnya tingkat transparansi ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan jangka panjang dan dapat menjadi hambatan bagi partisipasi aktif anggota. Sesuai dengan hasil penelitian Toha et al. (2023), transparansi dalam manajemen, khususnya terkait dengan penyampaian laporan keuangan, distribusi hasil, dan proses pengambilan keputusan, merupakan aspek krusial yang harus diperkuat untuk mencegah munculnya konflik internal dan meningkatkan legitimasi kepengurusan di mata anggota.

Keterlibatan petani dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan dan rasa memiliki terhadap kelompok. Berdasarkan hasil penelitian, hanya 44% responden yang merasa dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan 40% menyatakan keterlibatannya pada tingkat sedang, dan 16% merasa tidak dilibatkan sama sekali. Rendahnya keterlibatan ini menunjukkan adanya pola komunikasi yang bersifat top-down dalam pengelolaan kelompok, yang pada akhirnya dapat melemahkan ikatan

sosial antara pengurus dan anggota. Studi Elva et al. (2017) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan, pemahaman, dan kepatuhan anggota terhadap aturan kelompok berbanding lurus dengan keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ketidakterlibatan anggota dapat menciptakan jarak sosial dan psikologis, menurunkan motivasi untuk berpartisipasi, serta memperlemah dukungan terhadap program-program yang dijalankan oleh KTH. Selain itu, Hombokau et al. (2023) menegaskan bahwa partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan merupakan kunci utama dalam membangun *sense of belonging*, yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan partisipasi dan kinerja kelembagaan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan partisipasi petani dalam KTH di KPH Way Terusan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap pengurus, transparansi manajemen, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan KTH melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Penerapan prinsip ini diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan anggota, meningkatkan motivasi partisipasi, serta mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Peran Kelembagaan dan Program Perhutanan Sosial

Peran kelembagaan, khususnya dalam konteks implementasi Program Perhutanan Sosial, memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mendorong partisipasi petani dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Program ini dirancang untuk memberikan akses legal kepada masyarakat terhadap kawasan hutan negara, sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari. Keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada efektivitas peran kelembagaan, baik yang bersifat formal seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) maupun kelembagaan informal di tingkat komunitas. Horota et al. (2018) menegaskan bahwa dukungan kelembagaan, termasuk pendampingan yang intensif dan berkelanjutan, menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas Program Perhutanan Sosial (Tabel 6).

Tabel 6. Peran Kelembagaan dan Program Perhutanan Sosial

| Peran Kelembagaan dan Program Perhutanan Sosial | Kategori | Jumlah Responden (n=50) | Persentase (%) |
|---|--------------|-------------------------|----------------|
| Efektivitas Pendampingan | Tinggi (4-5) | 27 | 54 |
| | Sedang (3) | 18 | 36 |
| | Rendah (1-2) | 5 | 10 |
| Akses ke Sumber Daya | Baik (4-5) | 25 | 50 |
| | Cukup (3) | 20 | 40 |
| | Kurang (1-2) | 5 | 10 |
| Dukungan Pemerintah | Tinggi (4-5) | 28 | 56 |
| | Sedang (3) | 15 | 30 |
| | Rendah (1-2) | 7 | 14 |

Sumber: analisis data primer, 2025

Hasil penelitian yang disajikan pada **Tabel 6** menunjukkan bahwa 54% responden menilai efektivitas pendampingan yang diberikan oleh KPH Way Terusan berada pada kategori tinggi. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan penyuluhan, pelatihan teknis, dan pendampingan lapangan telah cukup efektif dalam meningkatkan kapasitas petani, baik dalam aspek manajerial kelembagaan KTH maupun dalam pengelolaan usaha tani hutan secara berkelanjutan. Namun demikian, masih terdapat 36% responden yang menilai efektivitas pendampingan pada tingkat sedang, dan 10% responden menilai rendah, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan belum merata dan masih memerlukan perbaikan dalam hal intensitas dan cakupan kegiatan.

Dari aspek akses terhadap sumber daya, sebanyak 50% responden menyatakan bahwa akses mereka terhadap sumber daya produksi, seperti bibit, modal usaha, dan informasi teknis, telah difasilitasi dengan baik oleh program Perhutanan Sosial. Sementara itu, 40% menilai aksesnya cukup, dan 10% masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber daya tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun program telah berupaya menyediakan dukungan sumber daya, masih terdapat keterbatasan distribusi dan efektivitas dalam menjangkau seluruh kelompok tani secara merata. Kondisi ini menuntut adanya perbaikan dalam mekanisme distribusi bantuan, peningkatan akses permodalan, serta penguatan kapasitas petani dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara produktif.

Dukungan pemerintah terhadap implementasi Program Perhutanan Sosial di wilayah KPH Way Terusan juga dinilai tinggi oleh 56% responden. Dukungan ini tercermin dalam berbagai bentuk, seperti penyusunan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat, alokasi anggaran untuk kegiatan pendampingan, serta fasilitasi akses pasar bagi produk-produk hasil hutan. Meskipun demikian, masih terdapat 30% responden yang menilai dukungan pemerintah berada pada tingkat sedang, dan 14% menilai rendah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan dukungan kebijakan dan peningkatan komitmen pemerintah daerah masih diperlukan untuk memperluas dampak program secara lebih merata. Peran penyuluh kehutanan di KPH Way Terusan sebagai fasilitator lapangan juga berperan penting dalam mendorong keberhasilan dan keberlanjutan program. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, penyuluh telah berperan aktif dalam membangun kesadaran, memberikan pelatihan teknis, membimbing kelompok tani dalam pengelolaan kelembagaan, serta menyampaikan informasi terkait akses program dan pengembangan usaha tani hutan. Peran ini sejalan dengan temuan Suprayitno et al. (2011), yang menyatakan bahwa intensitas dan kualitas peran penyuluh kehutanan secara signifikan meningkatkan kapasitas petani dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penguatan peran kelembagaan, peningkatan efektivitas program pendampingan, perluasan akses terhadap sumber daya produksi, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan merupakan faktor krusial dalam meningkatkan partisipasi petani dalam KTH. Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan kelembagaan, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif anggota, menjadi

strategi penting untuk memperkuat keberhasilan Program Perhutanan Sosial di wilayah KPH Way Terusan.

KESIMPULAN

Partisipasi petani dalam *Kelompok Tani Hutan (KTH)* di wilayah KPH Way Terusan secara signifikan dipengaruhi oleh akses legal yang diberikan melalui Program Perhutanan Sosial, yang menjadi motivasi utama keterlibatan petani dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Namun, keberlanjutan partisipasi tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh legalitas, melainkan juga oleh faktor ekonomi, kelembagaan, dan sosial yang saling berinteraksi. Faktor ekonomi terkait erat dengan ketersediaan akses pasar bagi produk hasil hutan, sementara dukungan kelembagaan, terutama melalui pendampingan teknis, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penyediaan sumber daya, berperan penting dalam memperkuat fungsi KTH. Dari aspek sosial, keberadaan jaringan sosial yang kuat, tingginya kepercayaan terhadap pengurus kelompok, serta transparansi dan akuntabilitas manajemen, menjadi faktor krusial dalam membangun iklim partisipasi yang kondusif. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi petani secara berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup penguatan akses legal, pengembangan pasar, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan modal sosial. Sinergi antara pemerintah, KPH, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan mendukung pengelolaan hutan secara lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Nugroho S.S., & Elviandri. 2017. Legalitas Perhutanan Sosial: Sebuah Harapan Menuju Kemakmuran Masyarakat Kawasan Hutan. *Yustisia Merdeka*, 3 (2): 97-106.
- Agusti T.M., Nurjaya I.N., & Imam K.I. 2019. Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Sekitar Hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4 (2): 300-309.
- Alimuna, W. & Srifitriani, A. 2022. Peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Nanga-Nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Georafflesia*, 7(1): 104-110.
- Armiwal & Suhaibah. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Mangrove. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2): 17-31.
- Elva, Kaskoyo, H., Herdiyanti I.G., & Yuwono S.B. 2017. Kajian Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Dalam Program Kemitraan Di KPHP Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*, 5 (1): 1-7.
- Faizal, A.N., & Sunan, M.I. 2023. Dampak Program Perhutanan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Kelestarian Hutan. *Welvaart*, 4(2): 114-125
- Herdiyanti dan Saputra, P.P., 2022. *Peran Modal Sosial dalam Memperkuat Jaringan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kampung Kapitan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka*. Makalah disajikan dalam Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI, Balikpapan, 1-3 Juni 2022.
- Hombokau, I.C.A., Tasirin, J.S. & Walangitan, H.D. 2023. Strategi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan Dalam Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung Gunung Lembean Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V. *Agri-SocioEkonomi Unsrat*, 19(2): 1189 - 1200.

- Horota, F.T., Nugroho, B. & Marwa, J. 2018. Kelembagaan Masyarakat dalam Pengembangan Program Perhutanan Sosial: Studi Kasus Kabupaten Manokwari. *Jurnal Kehutanan Papuaasia* 4(2): 100-113.
- Martapani, A.N., Fauzi, H. & Naparin, M. 2021. Dampak Hutan Kemasyarakatan terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Studi Kasus: Masyarakat Peduli Gambut Sukamaju KPH Kayu Tangi. *Jurnal Rimba Lestari*, 1(1): 35-46.
- Suprayitno, A.R., Sumardjo, Gani, D.S. & Sugihen, B.G. 2011. Model Peningkatan Partisipasi Petani Sekitar Hutan dalam Mengelola Hutan Kemiri Rakyat: Kasus Pengelolaan Hutan Kemiri Kawasan Pegunungan Bulusaraung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3): 176-193.
- Supriono, A., Bowo, C., Kosasih, A.S. & Herawati, T. 2013. Strategi Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Rakyat di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(3): 139-146.
- Toha, M., Wihadanto A. & Nurhasanah. 2023. Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dalam mendukung kelestarian hutan di Kota Tarakan. *Ulin - Jurnal Hutan Tropis*, 7(2): 133-141.
- WardhanyA.C. 2009. *Teori Komunikasi*. Galia Indonesia Bogor.